



**KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI
REPUBLIK INDONESIA**

Nomor : UND/511/KSP.00/70-76/04/2024 25 April 2024
Sifat : Segera
Lampiran : Satu Berkas
Hal : Rapat Koordinasi Daerah (Rakorda)
Pencegahan Korupsi Pada Pemerintah
Daerah di Wilayah V Tahun 2024

Yth. Kepala Daerah (daftar terlampir)

di

Tempat

Berdasarkan ketentuan pasal 6 huruf b dan d Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi bahwa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bertugas melakukan koordinasi dengan instansi yang berwenang melaksanakan pemberantasan tindak pidana korupsi dan instansi yang bertugas melaksanakan pelayanan publik, serta supervisi terhadap instansi yang berwenang melaksanakan pemberantasan tindak pidana korupsi.

Sehubungan dengan pelaksanaan Program Koordinasi Pemberantasan Korupsi periode Tahun 2024, kami akan melaksanakan kegiatan Rapat Koordinasi Daerah (Rakorda) Pencegahan Tindak Pidana Korupsi Pada Pemerintah Daerah di Wilayah V Tahun 2024, pada:

Hari/ Tanggal : Kamis/2 Mei 2024
Waktu : Pukul 08.30 – 16.45 WITA
Tempat : Aula Gedung Wiswa Sabha Pemerintah Provinsi Bali
Agenda : Terlampir

Berkenaan hal tersebut di atas, mohon kehadiran Saudara secara *online* melalui *Link Zoom meeting* (terlampir).

Untuk informasi dan koordinasi lebih lanjut dapat menghubungi Sdr. Siswanto di nomor handphone 0852-8663-4222 atau Sdr. Handayani di nomor telepon 021-25578300 ext.7067/ HP. 0812-3088-7205.

Jalan Kuningan Persada Kav.4, Setiabudi, Jakarta 12950
Telepon (021) 25578300, Faksimile (021) 25578333, (021) 52892456 <http://www.kpk.go.id>

Atas perhatian dan kerja sama Saudara, disampaikan terima kasih.

a.n. Pimpinan

Deputi Bidang Koordinasi dan Supervisi,
Komisi Pemberantasan Korupsi



Dokumen ini ditandatangani secara digital

Didik Agung Widjanarko

Tembusan:

1. Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi
2. Inspektur Komisi Pemberantasan Korupsi

Lampiran I Surat
Nomor : UND/511/KSP.0
0/70-76/04/2024
Tanggal : 25 April 2024

Daftar Pejabat Penerima Surat

Provinsi Nusa Tenggara Barat
Kepada Yth.:

1. Bupati/Walikota Kota Bima
2. Bupati/Walikota Kota Mataram
3. Bupati/Walikota Kabupaten Bima
4. Bupati/Walikota Kabupaten Dompu
5. Bupati/Walikota Kabupaten Lombok Barat
6. Bupati/Walikota Kabupaten Lombok Timur
7. Bupati/Walikota Kabupaten Lombok Utara
8. Bupati/Walikota Kabupaten Lombok Tengah
9. Bupati/Walikota Kabupaten Sumbawa Barat
10. Bupati/Walikota Kabupaten Sumbawa

Provinsi Nusa Tenggara Timur
Kepada Yth:

1. Kepala Kantor Wilayah ATR/BPN Provinsi Nusa Tenggara Timur
2. Bupati/Walikota Kota Kupang
3. Bupati/Walikota Kabupaten Belu
4. Bupati/Walikota Kabupaten Alor
5. Bupati/Walikota Kabupaten Ende
6. Bupati/Walikota Kabupaten Sikka
7. Bupati/Walikota Kabupaten Ngada
8. Bupati/Walikota Kabupaten Kupang
9. Bupati/Walikota Kabupaten Malaka
10. Bupati/Walikota Kabupaten Lembata
11. Bupati/Walikota Kabupaten Nagekeo
12. Bupati/Walikota Kabupaten Manggarai
13. Bupati/Walikota Kabupaten Flores Timur
14. Bupati/Walikota Kabupaten Manggarai Barat
15. Bupati/Walikota Kabupaten Manggarai Timur
16. Bupati/Walikota Kabupaten Timor Tengah Utara
17. Bupati/Walikota Kabupaten Timor Tengah Selatan
18. Bupati/Walikota Kabupaten Sumba Barat Daya
19. Bupati/Walikota Kabupaten Sumba Tengah
20. Bupati/Walikota Kabupaten Sumba Timur
21. Bupati/Walikota Kabupaten Sumba Barat
22. Bupati/Walikota Kabupaten Sabu Raijua
23. Bupati/Walikota Kabupaten Rote Ndao

Provinsi Maluku

Kepada Yth.:

1. Kepala Kantor Wilayah ATR/BPN Provinsi Maluku
2. Bupati/Walikota Kota Tual
3. Bupati/Walikota Kota Ambon
4. Bupati/Walikota Kabupaten Buru
5. Bupati/Walikota Kabupaten Buru Selatan
6. Bupati/Walikota Kabupaten Kepulauan Aru
7. Bupati/Walikota Kabupaten Maluku Tengah
8. Bupati/Walikota Kabupaten Maluku Tenggara
9. Bupati/Walikota Kabupaten Maluku Barat Daya
10. Bupati/Walikota Kabupaten Seram Bagian Barat
11. Bupati/Walikota Kabupaten Seram Bagian Timur
12. Bupati/Walikota Kabupaten Kepulauan Tanimbar

Provinsi Maluku Utara

Kepada Yth.:

1. Kepala Kantor Wilayah ATR/BPN Provinsi Maluku Utara
2. Bupati/Walikota Kota Ternate
3. Bupati/Walikota Kota Tidore Kepulauan
4. Bupati/Walikota Kabupaten Pulau Taliabu
5. Bupati/Walikota Kabupaten Pulau Morotai
6. Bupati/Walikota Kabupaten Kepulauan Sula
7. Bupati/Walikota Kabupaten Halmahera Utara
8. Bupati/Walikota Kabupaten Halmahera Barat
9. Bupati/Walikota Kabupaten Halmahera Timur
10. Bupati/Walikota Kabupaten Halmahera Tengah
11. Bupati/Walikota Kabupaten Halmahera Selatan

Provinsi Papua

Kepada Yth.:

1. Kepala Kantor Wilayah ATR/BPN Provinsi Papua
2. Bupati/Walikota Kabupaten Jayapura
3. Bupati/Walikota Kota Jayapura
4. Bupati/Walikota Kabupaten Keerom
5. Bupati/Walikota Kabupaten Sarmi
6. Bupati/Walikota Kabupaten Mamberamo Raya
7. Bupati/Walikota Kabupaten Waropen
8. Bupati/Walikota Kabupaten Kepulauan Yapen
9. Bupati/Walikota Kabupaten Biak Numfor
10. Bupati/Walikota Kabupaten Supiori

Provinsi Papua Selatan

Kepada Yth.:

1. Bupati/Walikota Kabupaten Merauke
2. Bupati/Walikota Kabupaten Mappi
3. Bupati/Walikota Kabupaten Asmat
4. Bupati/Walikota Kabupaten Boven Digoel

Provinsi Papua Tengah

Kepada Yth.:

1. Bupati/Walikota Kabupaten Mimika
2. Bupati/Walikota Kabupaten Nabire
3. Bupati/Walikota Kabupaten Dogiayi
4. Bupati/Walikota Kabupaten Paniai
5. Bupati/Walikota Kabupaten Deiyai
6. Bupati/Walikota Kabupaten Intan Jaya
7. Bupati/Walikota Kabupaten Puncak
8. Bupati/Walikota Kabupaten Puncak Jaya

Provinsi Papua Pegunungan

Kepada Yth.:

1. Bupati/Walikota Kabupaten Mamberamo Tengah
2. Bupati/Walikota Kabupaten Lanny Jaya
3. Bupati/Walikota Kabupaten Yahukimo
4. Bupati/Walikota Kabupaten Yalimo
5. Bupati/Walikota Kabupaten Nduga
6. Bupati/Walikota Kabupaten Tolikara
7. Bupati/Walikota Kabupaten Jayawijaya
8. Bupati/Walikota Kabupaten Pegunungan Bintang

Provinsi Papua Barat

Kepada Yth.:

1. Bupati/Walikota Kabupaten Manokwari
2. Bupati/Walikota Kabupaten Pegunungan Arfak
3. Bupati/Walikota Kabupaten Manokwari Selatan
4. Bupati/Walikota Kabupaten Teluk Wondama
5. Bupati/Walikota Kabupaten Teluk Bintuni
6. Bupati/Walikota Kabupaten Kaimana
7. Bupati/Walikota Kabupaten Fak-fak

Provinsi Papua Barat Daya

Kepada Yth.:

1. Bupati/Walikota Kota Sorong
2. Bupati/Walikota Kabupaten Sorong
3. Bupati/Walikota Kabupaten Sorong Selatan
4. Bupati/Walikota Kabupaten Raja Ampat
5. Bupati/Walikota Kabupaten Tambrau
6. Bupati/Walikota Kabupaten Maybrat

a.n. Pimpinan

Deputi Bidang Koordinasi dan Supervisi,
Komisi Pemberantasan Korupsi



Dokumen ini ditandatangani secara digital

Didik Agung Widjanarko

Lampiran II Surat
Nomor : UND/511/KSP.00/70-
76/04/2024
Tanggal: 25 April 2024

Rundown Kegiatan
Rapat Koordinasi Daerah (Rakorda) Pencegahan Korupsi Pada Pemerintah
Daerah di Wilayah V Tahun 2024

Waktu (WITA)	Kegiatan	Keterangan
08.30 – 09.00	Registrasi Peserta <i>Online</i> dan <i>Offline</i> . Peserta hadir secara <i>Offline</i> sebanyak 115 orang terdiri dari: <ul style="list-style-type: none">• Kepala Daerah, Ketua DPRD, Sekda, Inspektur, Admin MCP se-Bali (50)• Itjen Kemdagri, Direktur BMD-BLUD Kemdagri, Direktur LKPP• Gubernur dan Inspektur dari NTB, NTT, Maluku, Maluku Utara, Papua, Papua Barat, Papua Tengah, Papua Selatan, Papua Barat Daya• Forkompimda Provinsi Bali• Walikota Sorong dan Bupati Sumba Timur• Tim KPK (Deputi Korsup, Direktur Korsup V dan Tim)	Panitia KPK dan Pemprov Bali Dresscode : a. Peserta dari Bali menggunakan Pakaian Adat Bali b. Peserta dari Luar Bali menggunakan Pakaian Batik + Udeng (Penutup Kepala Khas Bali)
09.00 – 09.15	Pembukaan 1. Menyanyikan Lagu Indonesia Raya 2. Pembacaan Do'a	MC Panitia Pemprov Bali
09.15 – 09.45	Sambutan dan Arahan <ul style="list-style-type: none">• Pj.Gubernur Bali• Inspektur Jenderal Kementerian Dalam Negeri• Deputi Bidang Koordinasi dan Supervisi	Deputi Korsup KPK sekaligus membuka acara secara resmi
09.45 – 10.00	Penyerahan Penghargaan MCP dengan Kategori: a. Peningkatan Tertinggi Skor MCP Tahun 2023 dibandingkan tahun 2022 b. Capaian sertifikasi BMD Terbanyak dan Terluas c. Capaian Penertiban PSU Terbanyak Foto bersama seluruh peserta	Dipandu oleh MC Diserahkan oleh Deputi Korsup KPK Disaksikan oleh Itjen Kemdagri, Kaper BPKP Bali dan Direktur Korsup Wilayah V
10.00– 10.30	Doorstop : 1. Deputi Korsup KPK 2. Itjen Kemdagri 3. Kepala Perwakilan BPKP Bali	Dipandu oleh MC

10.00 – 12.30	Diskusi Panel I Implementasi Pengukuran Indeks Barang Milik Daerah (BMD) dan Tatakelola PBJ yang berintegritas Narasumber: 1. Direktur Korsup Wilayah V 2. Direktur BUMD, BLUD dan BMD Kemdagri 3. LKPP	Dipandu oleh Moderator: Dian Patria
12.30 – 13.30	ISHOMA	
13.30 – 16.30	Diskusi Panel II Evaluasi dan Strategi Peningkatan Perbaikan Tatakelola Pemerintah Daerah melalui MCP, Penyelamatan Keuangan Daerah, SPI dan IPAK 2024 Narasumber: Kasatgas V.1, Kasatgas V.2 dan Kasatgas V.3	Dipandu oleh Moderator: Prabawa Widi Nugroho
16.30 – 16.45	Pembacaan Simpulan dan Penutupan	
	Link Zoom Meeting: https://kpk-go-id.zoom.us/j/89829746298 Meeting ID : 898 2974 6298 Passcode : dn97pT6j	

a.n. Pimpinan
Deputi Bidang Koordinasi dan Supervisi,
Komisi Pemberantasan Korupsi



Dokumen ini ditandatangani secara digital
Didik Agung Widjanarko